

FENOMENA POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) DALAM PEMILU DI INDONESIA

**Sandy Pardo Edma¹, Kevin Darmawan², Rido Axl Rumanasen³, Faruq Alfitrah⁴, Jona
Bungaran Basuki Sinaga⁵**

^{1,2,3,4,5}Institut Pemerintahan Dalam Negeri

sandypardonst@gmail.com¹, kevindarmawan.92@gmail.com², rumanasenrido@gmail.com³,
faruqalfitrah1@gmail.com⁴, jonasinaga@ipdn.ac.id⁵

ABSTRAK

Politik uang merupakan salah satu masalah utama dalam praktik pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia, yang dapat merusak kualitas demokrasi dan menciptakan pemerintahan yang tidak mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Politik uang terjadi akibat berbagai faktor, seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan politik, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu. Praktik ini mengubah suara rakyat menjadi komoditas yang dapat dibeli, sehingga calon legislatif yang terpilih tidak selalu berdasarkan kapasitas atau visi yang baik, melainkan karena kemampuan mereka dalam memberikan materi. Dampak dari politik uang sangat besar, tidak hanya terhadap kualitas demokrasi, tetapi juga terhadap tingkat partisipasi politik dan kepercayaan publik terhadap sistem politik yang ada. Masyarakat yang merasa suara mereka dapat dibeli cenderung menjadi apatis terhadap proses politik dan menurunnya legitimasi pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai solusi untuk mengatasi politik uang, seperti memperkuat pengawasan Pemilu, meningkatkan pendidikan politik masyarakat, dan menegakkan sanksi tegas bagi para pelaku politik uang. Penelitian ini menyarankan agar upaya pencegahan dan penanggulangan politik uang dilakukan secara menyeluruh, melibatkan seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait, untuk menciptakan Pemilu yang lebih bersih dan demokratis.

Kata Kunci: Politik Uang, Kualitas Demokrasi, Partisipasi Politik.

ABSTRACT

Money politics is one of the main problems in the practice of general elections (Pemilu) in Indonesia, which can damage the quality of democracy and create a government that does not reflect the true will of the people. Money politics occurs due to various factors, such as economic limitations, low levels of political education, and weak supervision of the implementation of the Election. This practice turns the people's voice into a commodity that can be bought, so that the elected legislative candidates are not always based on their capacity or good vision, but rather because of their ability to provide material. The impact of money

politics is very large, not only on the quality of democracy, but also on the level of political participation and public trust in the existing political system. People who feel that their votes can be bought tend to become apathetic towards the political process and the legitimacy of the government decreases. Therefore, various solutions are needed to overcome money politics, such as strengthening election supervision, increasing public political education, and enforcing strict sanctions for perpetrators of money politics. This study suggests that efforts to prevent and overcome money politics be carried out comprehensively, involving all elements of society, government, and related institutions, to create a cleaner and more democratic Election.

Keywords: *Money Politics, Quality of Democracy, Political Participation.*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, Pemilu diharapkan dapat mencerminkan kehendak rakyat dan menjadi sarana untuk memperkuat sistem politik yang transparan dan akuntabel. Namun, dalam perjalanan Pemilu di Indonesia, terdapat berbagai tantangan yang menghambat tercapainya tujuan tersebut, salah satunya adalah fenomena politik uang (money politic). Politik uang, yang merujuk pada penggunaan uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan politik pemilih, menjadi salah satu masalah serius yang terus berkembang, meskipun telah ada peraturan yang mengatur secara tegas mengenai hal ini.

Politik uang (money politics) merupakan salah satu fenomena kompleks yang secara sistematis menggerogoti fundamen demokrasi di Indonesia. Praktik ini tidak sekadar menjadi persoalan teknis dalam proses pemilihan umum, melainkan cerminan dari struktural sosial-politik yang rapuh dan sistem kelembagaan yang belum matang. Sejak era reformasi 1998, Indonesia telah mengalami transformasi sistem politik dari rezim otoriter menuju demokrasi prosedural, namun ironisnya, praktik politik uang justru semakin mengakar dan sophisticated.

Fenomena politik uang bukanlah hal yang baru dalam sejarah Pemilu di Indonesia. Praktik ini sudah ada sejak Pemilu pertama yang dilaksanakan pada tahun 1955 dan terus berlanjut hingga Pemilu-pemilu berikutnya. Pada Pemilu 1999, misalnya, pasca-reformasi, politik uang juga tetap menjadi persoalan yang mencolok meskipun ada harapan besar untuk perubahan. Pada Pemilu 2019, KPU (Komisi Pemilihan Umum) melaporkan bahwa terdapat banyak laporan mengenai praktik politik uang yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, baik di tingkat legislatif, eksekutif, maupun daerah. Meskipun tidak ada angka pasti

yang menggambarkan seberapa besar pengaruh politik uang terhadap hasil Pemilu, beberapa studi dan laporan menunjukkan bahwa praktik ini cukup luas dan merusak kualitas demokrasi.

Menurut data yang dihimpun oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Pemilu 2019, lebih dari 3.000 laporan terkait politik uang diterima, dan dari jumlah tersebut, sebagian besar berasal dari daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap informasi politik dan terhimpit oleh masalah ekonomi lebih rentan terhadap tawaran materi dari calon legislatif atau kepala daerah. Misalnya, di daerah-daerah yang tergolong miskin, seperti di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua, politik uang sering dijadikan sebagai salah satu strategi yang efektif untuk meraih simpati pemilih. Di sisi lain, fenomena ini juga menunjukkan ketimpangan antara politik yang ideal dan praktik yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sepanjang periode 2014-2024, tercatat sedikitnya 1.853 kasus Politik Uang yang teridentifikasi dalam berbagai pemilihan umum, baik ditingkat nasional maupun lokal. Angka ini merepresentasikan 37% dari total pelanggaran pemilu, dengan estimasi kerugian demokrasi mencapai triliunan rupiah. Studi komprehensif yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik LIPI pada 2022 menunjukkan bahwa 68% responden di 34 provinsi pernah mengalami atau menyaksikan praktik Politik Uang secara langsung.

Terdapat beberapa faktor yang memperburuk praktik politik uang di Indonesia. Pertama, ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi yang cukup lebar antarwilayah menjadi salah satu pemicu utama. Banyak pemilih yang merasa kebutuhan sehari-harinya belum tercukupi, sehingga ketika dihadapkan dengan tawaran uang atau barang dari calon tertentu, mereka lebih memilih untuk menerima bantuan tersebut meskipun harus mengorbankan hak pilihnya. Kedua, faktor kelemahan dalam penegakan hukum juga berperan besar. Meskipun sudah ada undang-undang yang melarang praktik politik uang, sering kali pengawasan yang lemah dan hukuman yang tidak tegas membuat praktik ini tetap terjadi tanpa adanya efek jera. Selain itu, rendahnya partisipasi politik dan pendidikan politik yang tidak merata di Indonesia turut memperburuk situasi ini, di mana banyak pemilih tidak memahami sepenuhnya dampak dari memilih berdasarkan iming-iming materi. Dimensi kompleksitas Politik Uang di Indonesia tidak dapat diurai sekadar dari perspektif ekonomi semata. Ia merupakan simpul dari

persilangan berbagai faktor: sosial, budaya, ekonomi, dan struktural politik. Data Kementerian Dalam Negeri pada 2023 menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan di atas 20% memiliki korelasi signifikan dengan intensitas Politik Uang yang tinggi. Provinsi seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Sulawesi Tenggara tercatat sebagai wilayah dengan praktik Politik Uang paling masif.

Sebagai konsekuensi dari praktik politik uang, Pemilu seringkali menghasilkan keputusan yang tidak mencerminkan pilihan politik rakyat yang sesungguhnya. Pemilih yang memilih karena iming-iming materi cenderung tidak mempertimbangkan visi, misi, dan program kerja calon yang lebih luas dan menyeluruh. Hal ini tidak hanya merusak integritas Pemilu, tetapi juga menciptakan sistem pemerintahan yang lemah dan tidak efektif. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang di Indonesia, dampaknya terhadap kualitas demokrasi, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk menanggulangnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena politik uang dalam Pemilu di Indonesia, dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan sistem Pemilu yang lebih adil, transparan, dan berkualitas di masa depan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Studi literatur dilakukan untuk mengkaji berbagai sumber yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta peraturan perundang-undangan terkait politik uang dalam Pemilu di Indonesia. Sumber-sumber tersebut dianalisis secara mendalam untuk memahami dinamika praktik politik uang, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan integritas Pemilu di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji penelitian sebelumnya yang membahas mengenai fenomena politik uang di berbagai daerah dan tingkatan Pemilu, serta membandingkannya dengan data yang ada. Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai peran politik uang dalam proses Pemilu, serta menawarkan perspektif baru dalam upaya untuk mengatasi praktik tersebut di masa depan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, fenomena politik uang dalam pemilihan calon anggota legislatif di Indonesia, khususnya di Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, menunjukkan sejumlah temuan yang mencerminkan kompleksitas praktik ini di masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh, beberapa faktor utama yang menyebabkan maraknya politik uang di kalangan masyarakat antara lain adalah keterbatasan ekonomi masyarakat, rendahnya kualitas pendidikan publik, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu. Masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah cenderung lebih rentan terhadap tawaran materi dari calon legislatif, yang dianggap sebagai solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, ketidakmerataan kualitas pendidikan membuat sebagian besar pemilih tidak sepenuhnya memahami dampak dari memilih berdasarkan uang, sehingga mereka lebih mudah dipengaruhi oleh iming-iming materi.

Proses politik uang di Desa Sandik, berdasarkan temuan lapangan, terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam beberapa kasus, calon legislatif atau tim suksesnya langsung memberikan uang atau barang kepada masyarakat sebagai imbalan atas suara mereka. Di sisi lain, dalam beberapa kasus lain, praktik politik uang dilakukan melalui perantara, seperti melalui relawan atau orang-orang yang dipercaya untuk mendistribusikan uang atau barang tersebut kepada pemilih. Proses ini berjalan dengan lancar karena adanya kepercayaan dan hubungan sosial antara calon legislatif dan masyarakat setempat, serta terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme Pemilu yang sebenarnya.

Dampak dari politik uang ini sangat merugikan kualitas demokrasi di Indonesia. Praktik ini tidak hanya merusak integritas Pemilu, tetapi juga menurunkan tingkat partisipasi politik yang sejati di kalangan masyarakat. Politik uang membuat pemilih lebih memilih kandidat berdasarkan materi yang diterima, bukan berdasarkan visi, misi, dan rekam jejak kandidat yang sebenarnya. Hal ini dapat menyebabkan pemilihan umum yang tidak mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Selain itu, praktik politik uang juga berpotensi menyebabkan ketimpangan sosial yang lebih besar, karena hanya mereka yang memiliki kekuatan ekonomi yang dapat mempengaruhi hasil Pemilu. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mengarah pada terjadinya pemerintahan yang tidak berkualitas dan tidak mampu memprioritaskan

kepentingan rakyat banyak, melainkan hanya melayani segelintir pihak yang memiliki kekuatan finansial.

Fenomena politik uang ini juga berdampak negatif terhadap stabilitas demokrasi di Indonesia. Seperti yang terungkap dalam penelitian terkait di beberapa daerah lainnya, praktik politik uang ini tidak hanya terjadi dalam skala kecil, tetapi juga meluas pada tingkat nasional, terutama pada saat Pemilu legislatif. Meskipun Undang-Undang tentang Pemilu dan peraturan lainnya telah melarang praktik ini, namun pengawasan yang lemah dan tidak ada sanksi yang cukup tegas membuat politik uang terus terjadi, bahkan cenderung menjadi bagian dari budaya politik di Indonesia. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya mengedepankan keadilan, transparansi, dan partisipasi yang sejati dari masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah yang lebih konkret dan terkoordinasi dalam mengatasi praktik politik uang agar Pemilu di Indonesia dapat berjalan lebih adil dan bebas dari pengaruh materi yang merusak integritas proses demokrasi.

Pembahasan

Faktor Penyebab Politik Uang

Praktik politik uang di Indonesia, khususnya di daerah-daerah seperti Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, tidak dapat dipandang sebagai fenomena yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari sejumlah faktor yang saling terkait. Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya politik uang adalah keterbatasan ekonomi yang dialami oleh sebagian besar masyarakat. Masyarakat di daerah tersebut, yang seringkali berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, menghadapi berbagai kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, uang atau bantuan materi seringkali dilihat sebagai solusi instan yang dapat meringankan beban hidup mereka. Oleh karena itu, praktik politik uang menjadi sangat menarik bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut, karena calon legislatif menawarkan imbalan berupa uang atau barang untuk mendapatkan dukungan mereka. Hal ini menciptakan sebuah hubungan transaksional antara kandidat politik dan pemilih yang bersifat sementara, namun sangat efektif dalam mempengaruhi keputusan politik mereka.

Selain itu, rendahnya kualitas pendidikan masyarakat juga menjadi faktor yang memperburuk fenomena politik uang. Di banyak daerah, terutama di desa-desa, akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih terbatas. Kurangnya pemahaman tentang mekanisme

Pemilu, prinsip-prinsip demokrasi, dan dampak jangka panjang dari politik uang membuat masyarakat cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh tawaran materi dari calon legislatif. Mereka tidak sepenuhnya menyadari bahwa memilih berdasarkan uang dapat merugikan proses demokrasi dan mengarah pada pemimpin yang tidak berkualitas. Akibatnya, mereka memilih calon hanya karena pemberian uang atau barang, bukan berdasarkan kompetensi atau visi misi yang lebih luas. Ini menciptakan situasi di mana demokrasi diabaikan demi keuntungan pribadi yang sesaat.

Keadaan ini semakin diperburuk oleh lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu. Pengawasan yang tidak maksimal dari pihak berwenang memungkinkan praktik politik uang berkembang dengan bebas tanpa adanya tindakan tegas. Di banyak daerah, pengawasan Pemilu sering kali tidak cukup ketat, sehingga calon legislatif dan tim sukses mereka dapat dengan mudah melaksanakan praktik politik uang tanpa takut akan konsekuensi hukum. Kurangnya sanksi yang memadai bagi para pelaku politik uang juga semakin memperburuk situasi, karena mereka merasa bebas untuk melakukan penyimpangan tanpa takut dihukum. Hal ini menciptakan ruang bagi praktik politik uang untuk terus berkembang, yang pada gilirannya merusak kualitas Pemilu dan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, kombinasi dari keterbatasan ekonomi, rendahnya kualitas pendidikan, dan lemahnya pengawasan menjadi faktor-faktor utama yang mendasari maraknya politik uang di Indonesia.

Proses Terjadinya Politik Uang

Proses terjadinya politik uang di Indonesia dapat dilihat melalui dua mekanisme utama, yakni secara langsung dan tidak langsung. Kedua mekanisme ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mempengaruhi pemilih agar mendukung calon legislatif dengan iming-iming materi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam proses politik uang yang langsung, calon legislatif atau tim sukses mereka memberikan uang atau barang secara langsung kepada pemilih. Pemberian ini bisa berupa uang tunai, makanan, atau barang-barang lainnya yang bernilai atau menarik bagi masyarakat. Tujuan dari pemberian ini adalah untuk menarik minat pemilih dengan menawarkan sesuatu yang langsung dapat mereka nikmati, dengan harapan bahwa imbalan materi ini akan mendorong mereka untuk memberikan suara kepada calon yang bersangkutan. Biasanya, mekanisme ini dilakukan dalam jangka waktu yang sangat dekat dengan hari pemilihan, sering kali pada saat kampanye terbuka atau pertemuan langsung

dengan masyarakat. Pemberian materi tersebut sering kali dimaksudkan untuk menciptakan hubungan transaksional antara calon legislatif dan pemilih, dengan harapan bahwa pemilih akan merasa terikat untuk mendukung calon yang telah memberikan bantuan atau hadiah tersebut.

Di sisi lain, terdapat pula proses politik uang yang dilakukan secara tidak langsung, yang sering kali lebih sulit untuk dideteksi dan lebih canggih dalam pelaksanaannya. Dalam mekanisme ini, calon legislatif atau tim sukses tidak memberikan bantuan langsung kepada pemilih, melainkan melalui perantara seperti relawan, tokoh masyarakat, atau pihak ketiga yang dipercaya untuk mendistribusikan uang atau barang kepada masyarakat. Proses ini biasanya berlangsung di belakang layar, jauh dari pengawasan langsung, sehingga lebih sulit terdeteksi oleh pengawas Pemilu. Melalui perantara ini, calon legislatif dapat mencapai lebih banyak pemilih dalam waktu singkat tanpa harus terlibat langsung dalam pemberian materi. Hal ini juga memungkinkan calon legislatif untuk lebih leluasa dalam memanipulasi distribusi materi kepada pemilih yang dianggap potensial untuk memberikan suara. Meskipun kedua proses ini memiliki mekanisme yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mempengaruhi pilihan politik pemilih dengan memberikan sesuatu yang langsung dapat mereka rasakan, entah berupa uang, barang, atau bantuan lainnya. Dalam kedua kasus ini, politik uang berfungsi sebagai alat yang efektif dalam memperoleh dukungan pemilih, namun di sisi lain, hal ini merusak proses demokrasi yang seharusnya berlangsung berdasarkan pemahaman dan pilihan rasional pemilih, bukan berdasarkan imbalan materi.

Dampak Politik Uang terhadap Kualitas Demokrasi

Dampak utama dari praktik politik uang terhadap kualitas demokrasi sangat merusak dan dapat mengubah esensi dari pemilu itu sendiri. Pemilu, yang seharusnya menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin berdasarkan visi, misi, dan kapasitas individu, berubah menjadi arena transaksi materi. Ketika suara rakyat dijadikan komoditas yang dapat dibeli dengan uang, integritas Pemilu sebagai proses demokrasi yang sehat menjadi tergerus. Masyarakat yang seharusnya memilih pemimpin berdasarkan kompetensi dan program kerja yang ditawarkan, justru beralih memilih berdasarkan imbalan materi yang mereka terima, seperti uang atau barang. Hal ini secara langsung menurunkan kualitas proses pemilu karena

pemilih tidak lagi didorong oleh pertimbangan rasional dan visi masa depan yang lebih baik, tetapi oleh kebutuhan ekonomi jangka pendek yang ditawarkan oleh calon legislatif.

Akibat dari fenomena ini, calon legislatif yang terpilih sering kali bukanlah mereka yang memiliki kualitas terbaik atau program yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, yang terpilih adalah calon yang memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk memberikan materi kepada pemilih. Ini berarti, kualifikasi dan kredibilitas calon dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan bukanlah hal yang utama dalam penilaian pemilih. Hal ini bisa menciptakan pemerintahan yang tidak mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya, tetapi lebih mencerminkan kepentingan sekelompok orang atau pihak tertentu yang memiliki kekuatan ekonomi. Calon yang terpilih melalui praktik politik uang mungkin lebih fokus pada pemenuhan janji kepada pemberi materi daripada memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Selain itu, praktik politik uang juga memiliki dampak negatif terhadap partisipasi politik yang sejati dalam masyarakat. Masyarakat menjadi merasa bahwa Pemilu bukan lagi tentang memilih pemimpin berdasarkan visi dan program yang terbaik untuk masa depan, tetapi lebih kepada keuntungan pribadi yang bisa mereka peroleh dari kandidat tertentu. Hal ini dapat menyebabkan penurunan minat dalam berpartisipasi dalam proses politik secara aktif, karena masyarakat merasa bahwa pilihan mereka sudah ditentukan oleh kekuatan materi, dan tidak ada perbedaan signifikan antara satu calon dengan yang lainnya. Pada akhirnya, politik uang merusak fondasi demokrasi itu sendiri, mengikis prinsip keadilan, dan menurunkan kualitas keputusan politik yang diambil oleh pemilih, sehingga dapat menghambat perkembangan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

Pengaruh Politik Uang terhadap Partisipasi Politik dan Kepercayaan Publik

Praktik politik uang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Ketika pemilih merasa bahwa suara mereka dapat dibeli dengan uang atau imbalan materi lainnya, mereka cenderung kehilangan rasa tanggung jawab moral terhadap proses pemilu. Pemilu yang seharusnya dipandang sebagai kesempatan untuk memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan positif dan mewakili kepentingan rakyat, justru berubah menjadi ajang transaksi yang menguntungkan secara pribadi. Hal ini menyebabkan pemilih tidak lagi melihat pemilu sebagai proses demokrasi yang esensial, tetapi

lebih sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Oleh karena itu, mereka cenderung tidak terlibat aktif dalam proses politik, tidak menyadari pentingnya memilih berdasarkan kualitas dan visi calon pemimpin, tetapi lebih mementingkan imbalan yang dapat mereka terima dari calon yang menawarkan materi. Dengan demikian, politik uang dapat mengurangi partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu, karena mereka merasa bahwa pemilu bukanlah soal peran aktif dalam menentukan arah kebijakan negara, melainkan soal mendapatkan keuntungan pribadi yang segera terasa.

Selain itu, praktik politik uang juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem Pemilu dan lembaga-lembaga politik secara umum. Ketika masyarakat melihat bahwa hasil Pemilu ditentukan oleh siapa yang memiliki uang untuk memberikan imbalan kepada pemilih, mereka mulai meragukan keabsahan dan keadilan proses pemilu itu sendiri. Masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak lagi dihargai berdasarkan pilihan rasional atau kesetiaan terhadap calon yang terbaik, tetapi lebih pada uang yang mereka terima. Dalam jangka panjang, hal ini akan mengikis legitimasi pemilu sebagai sarana demokrasi yang sah, sehingga menurunkan rasa kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem politik secara keseluruhan. Tanpa kepercayaan publik yang kuat, partisipasi politik akan semakin menurun, karena masyarakat tidak lagi merasa memiliki peran penting dalam menentukan arah pemerintahan. Ketiadaan kepercayaan ini akan mempengaruhi kualitas demokrasi itu sendiri, memperlemah hubungan antara rakyat dan pemerintah, dan akhirnya merusak stabilitas politik di negara tersebut.

Solusi dan Upaya Mengatasi Politik Uang

Mengatasi politik uang di Indonesia bukanlah hal yang mudah, karena praktik ini sudah menjadi bagian dari budaya politik di banyak daerah, termasuk di Desa Sandik, Batu Layar, dan wilayah-wilayah lainnya. Meskipun demikian, terdapat sejumlah langkah yang dapat diambil untuk mengurangi bahkan menghilangkan praktik politik uang yang merusak demokrasi. Salah satu solusi utama adalah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu. Pengawasan yang ketat dan transparan akan mempersulit calon legislatif atau tim sukses mereka untuk melakukan praktik politik uang tanpa terdeteksi. Selain itu, pengawasan ini harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap kampanye hingga penghitungan suara, agar segala bentuk praktik yang merugikan pemilih dan merusak proses demokrasi dapat

segera dicegah. Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik politik uang juga diperlukan, agar pelaku dapat diberikan sanksi yang setimpal, yang tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai pencegah bagi calon legislatif lainnya yang mungkin berniat melakukan hal serupa.

Selain pengawasan, pendidikan politik yang lebih baik dan lebih luas perlu diberikan kepada masyarakat. Pendidikan politik ini harus dimulai sejak dini dan terus berkelanjutan, dengan tujuan untuk membangun kesadaran politik yang kritis dan cerdas di kalangan pemilih. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya memilih berdasarkan visi, misi, dan rekam jejak calon legislatif, bukan berdasarkan materi yang mereka tawarkan. Masyarakat yang teredukasi akan lebih sulit dipengaruhi oleh tawaran politik uang, karena mereka sudah memiliki pemahaman yang cukup untuk menilai kualitas calon pemimpin mereka. Oleh karena itu, pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil perlu bersinergi dalam mengembangkan program-program pendidikan politik yang efektif, agar pemilih dapat membuat keputusan yang lebih rasional dalam memilih wakil rakyat mereka.

Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja keras untuk memastikan adanya sanksi yang tegas dan efektif terhadap para pelaku politik uang. Tidak hanya calon legislatif yang memberikan uang atau barang, tetapi juga pihak-pihak yang menjadi perantara, baik itu relawan ataupun organisasi yang terlibat dalam praktik ini. Sanksi yang tegas tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, tetapi juga untuk memberikan pesan bahwa politik uang tidak akan ditoleransi dalam sistem demokrasi yang sehat. Penerapan sanksi yang jelas, seperti pencabutan hak untuk mencalonkan diri, denda, atau hukuman penjara, diharapkan dapat menjadi deterrent bagi mereka yang berniat untuk melakukan praktik serupa di masa depan.

Secara keseluruhan, upaya-upaya ini akan berkontribusi dalam memperbaiki kualitas Pemilu di Indonesia dan memperkuat sistem demokrasi yang ada. Dengan pengawasan yang ketat, pendidikan politik yang lebih baik, dan penerapan sanksi yang lebih tegas, politik uang diharapkan dapat diminimalkan, sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin mereka dengan pertimbangan yang lebih matang dan jujur, demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Praktik politik uang di Indonesia, khususnya di daerah-daerah seperti Desa Sandik dan Batu Layar, merupakan masalah yang sangat kompleks dan telah merusak kualitas demokrasi di negara ini. Politik uang mengubah pemilu dari sebuah ajang untuk memilih pemimpin berdasarkan visi, misi, dan kapasitas ke dalam sebuah transaksi materi yang merendahkan integritas proses pemilihan. Hal ini menyebabkan pemilih lebih tertarik pada keuntungan pribadi yang bisa mereka dapatkan, bukan pada kualitas calon legislatif yang akan memimpin dan membuat kebijakan untuk kemajuan masyarakat. Dampaknya, kualitas demokrasi menurun, kepercayaan publik terhadap sistem pemilu terkikis, dan partisipasi politik masyarakat menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi politik uang harus melibatkan berbagai langkah strategis, termasuk memperkuat pengawasan dalam setiap tahap pemilu, memperbaiki sistem pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menegakkan sanksi yang tegas terhadap pelaku politik uang. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemilu dapat kembali menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang berkualitas, bukan berdasarkan materi, sehingga sistem demokrasi Indonesia dapat berjalan lebih sehat dan lebih baik. Semua pihak, baik pemerintah, lembaga pemilu, organisasi masyarakat, maupun warga negara, memiliki peran penting dalam menciptakan iklim politik yang jujur, adil, dan bebas dari politik uang. Dengan komitmen bersama, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih mencerminkan kehendak rakyat dan mampu membawa perubahan positif bagi bangsa Indonesia.

Saran

Untuk mengurangi dan akhirnya menghapuskan praktik politik uang di Indonesia, beberapa langkah strategis perlu segera diimplementasikan. Pertama, penting bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk memperkuat sistem pengawasan yang lebih transparan dan independen selama seluruh proses pemilu. Pengawasan yang ketat akan mempersulit calon legislatif atau tim sukses mereka untuk melakukan praktik politik uang tanpa terdeteksi, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih adil dan bersih. Selain itu, pendidikan politik bagi masyarakat harus diperkuat, khususnya di daerah-daerah yang rawan praktik politik uang. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bahaya memilih berdasarkan uang, serta mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang sejati, seperti memilih

berdasarkan kapasitas dan program kerja calon legislatif. Program-program pendidikan politik ini harus dimulai sejak dini, termasuk di tingkat sekolah, sehingga generasi mendatang bisa lebih paham dan bijak dalam menggunakan hak pilih mereka. Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya memilih berdasarkan visi dan misi, serta rekam jejak calon legislatif yang jelas, bukan hanya berdasarkan iming-iming materi. Selanjutnya, pemerintah harus menegakkan sanksi yang lebih tegas dan konsisten bagi para pelaku politik uang. Penerapan sanksi yang berat dan memberikan efek jera dapat menjadi langkah pencegahan yang efektif, agar praktik tersebut tidak terus berkembang. Dalam jangka panjang, kebijakan ini akan menciptakan iklim politik yang lebih bersih dan dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Terakhir, upaya kolaboratif antara lembaga pemerintahan, partai politik, masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga pendidikan sangat diperlukan untuk menciptakan perubahan budaya politik yang mengutamakan integritas, kejujuran, dan kepentingan bersama. Semua pihak harus bekerja sama untuk membangun demokrasi yang lebih sehat, dimana setiap suara dihargai berdasarkan kualitas dan bukan transaksi materi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ikhsan. (2015). *Pilar Demokrasi Kelima Studi Kualitatif Di Kota Serang Banten*. Yogyakarta: CV Budi utama.
- Ahmad, Khoirul Umam. (2006). *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*. Semarang: Rasail.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)*. Jakarta: BPS Press
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). *Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat*. RESIPROKAL, 1(1), 53-61. p-ISSN: 2685-7626.
- Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). *Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia*. NOTARIUS, 13(1). E-ISSN: 2686-2425, ISSN: 2086-1702.
- Nurjulaiha, S., Suryanef, & Rafni, A. (2022). *Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Menurut Perspektif Teori Political Development (Studi Di Provinsi Jambi)*. Indonesian Journal of Social Science Review, 1(2).
- Qodir, Z. (2014). *Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus dan Resolusinya*.

- Irawan, Dedi. Studi Tentang Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan. Jurnal ilmu pemerintah, Vol. 3, No 4
- Kasim dan Supardi. (2019). Money Poliitk Pada Pemilu 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan Dan Daya Imperatif Hukum Pemilu. Jurnal bawaslu, Vol. 2, No. 1
- Kadir, Gaul. (2014). Pembangunan Politik. Jakarta: Universitas Terbuka
- Matori, Abdul Djalil. (2014). Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3, No. 1
- Ramon. (2020). Problematika penyelesaian perkara tindak pidana politik uang (money politik) dalam pemilu. Jurnal of criminal Vol. 1 No. 2.